

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*)

Muhammad Luthfi<sup>1</sup>, Indah Lia Puspita<sup>2</sup>

Novi Sulistiya<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi<sup>1,2,3</sup>

Universitas Malahayati Bandar Lampung Indonesia

Email: [luthfi27@gmail.com](mailto:luthfi27@gmail.com), [novisulistiya31@gmail.com](mailto:novisulistiya31@gmail.com)

**Abstract.** *Fraud is a intentionally fault which could harming many people. In government sector, fraud is harming for public. This research is aimed to explore the influence of factors that impact fraud such as individual morality, internal control government system, accounting rules, motivation and law enforcement. Population research of as many as 90 employees by the respondent government agencies working in finance at the Department of subsection Tanggamus Regency. This research uses the questionnaires to collect the data. Data analysis in this research using analysis structural equation modeling with a smart PLS 3.0. The findings of the research showed that there is a negative effect beetwen individual morality and accounting rules with fraud, there is a positive effect between motivation with fraud, there is no effect between internal control government system with fraud.*

**Keywords:** *Individual Morality, Internal Control Government System, Accounting Rules and Motivation.*

### 1. Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Salah satu tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia adalah korupsi. Pada lembaga *Transparency International* (TI) Indonesia berada diperingkat ke-96 dengan skor CPI 37 dari skor maksimal 100. Skor ini menempatkan Indonesia masih dibawah rata-rata skor persepsi dunia.

**Tabel 1.1 Daftar Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2014	629 Kasus
2.	2015	550 Kasus
3.	2016	482 Kasus
4.	2017	576 Kasus

Sumber : *Indonesia Corruption Watch 2017*

**Tabel 2 Daftar Kasus *Fraud* di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus**

No.	Keterangan
1.	Kasus selanjutnya kasus suap Bupati Lampung Selatan terkait dengan Pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Sumber : <a href="http://www.kpk.go.id">www.kpk.go.id</a>
2.	Serta kasus suap terhadap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 dengan tersangka Kepala Dinas Marga Kabupaten Lampung Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sumber : <a href="http://www.kpk.go.id">www.kpk.go.id</a>
3.	Beberapa kasus korupsi yang terjadi adalah kasus suap oleh mantan Bupati Tanggamus kepada sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Sumber : <a href="http://kompas.com">kompas.com</a>
4.	Kasus selanjutnya kasus korupsi sejumlah paket kegiatan pengadaan & pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, diantaranya pengadaan 5 ambulance UGD, pembangunan puskesmas, alat kesehatan & pustu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus tahun 2017. Sumber : <a href="http://tipikornewsonline.com">tipikornewsonline.com</a>

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Novikasari (2017) dengan menambah variabel penelitian yaitu motivasi, yang memiliki hasil bahwa moralitas individu berpengaruh negatif, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif, sedangkan pada penelitian Ade (2017) moralitas tidak berpengaruh terhadap *fraud*, penelitian Savitri (2015) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ade (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Tujuan dilakukannya penelitian replikasi ini adalah untuk menguji ulang variabel-variabel tersebut dan mengetahui apakah dengan sampel, waktu yang berbeda dan penambahan variabel akan memberikan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian Novikasari (2017) menggunakan sampel SKPD Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa moralitas individu, sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan akuntansi dan motivasi berpengaruh secara langsung atau tidak. Sampel dalam penelitian ini SKPD di dinas pemerintah kabupaten Tanggamus yang terdiri dari 20 dinas dengan responden subbagian keuangan berjumlah 106 tenaga kerja

## 2. Kajian Pustaka

### *Fraud Triangle Theory*

Zimbelman *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa terdapat tiga elemen yang muncul secara bersamaan yang mendorong terjadinya kecurangan, yaitu karena disebabkan oleh adanya :

1. Tekanan (*pressure*), adalah dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang, penyebabnya lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang.
2. Kesempatan/peluang (*opportunity*), Peluang adalah faktor penyebab *fraud* yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, di mana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga dapat melakukan perbuatan curang.
3. Rasionalisasi (*rationalization*), Rasionalisasi adalah adanya sikap atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu melakukan kecurangan. Adinda, Y. M. (2015).

### **Teori Gone**

Menurut Manan, A., Rahmawati, W., & Alfianto, N. (2018) teori yang juga membahas perilaku *fraud* dengan baik dikemukakan oleh Jack Bologne (1995). Teori ini dikenal sebagai *GONE theory* yang menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) meliputi:

1. *Greed* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan *fraud* terhadapnya.
3. *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
4. *Exposure* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku *fraud* apabila pelaku ditemukan melakukan *fraud*.

### **Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)**

Menurut Zimelman (2014) kecurangan merupakan suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu yang dipilih oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Menurut Ardianingsih (2018) kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya melalui cara-cara ilegal yang dapat merugikan pihak lain. Sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, *Fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan, sedangkan *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidak beresan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No.32.

Menurut IAI dalam standar profesional akuntan publik (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### **Moralitas Individu**

Moralitas berasal dari bahasa latin *mos*, yang dalam bentuk jamaknya *mores* berarti adat istiadat atau kebiasaan, Bertens dalam buku Sagala (2013). Bertens menyatakan bahwa moralitas pada dasarnya sama dengan moral, yaitu berpegang pada nilai dan norma yang baik atau tidak baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan etiket atau adat sopan santun. Sedangkan individu adalah orang seorang, pribadi orang. Menurut Ade (2017) moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal sebagai bagian dari perilaku tidak etis oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakan standar moral. Beberapa penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg. Daft (2002) dalam Yusriwanti (2017) menguraikan tiga tahapan moralitas yaitu prakonvensional, konvensional dan pasca konvensional.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu: sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Ardianingsih (2018) pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instansi pemerintah daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam pemerintahan daerah terdapat Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No.20 tahun 2001).

### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “taat” yang artinya patuh, tunduk, mematuhi, sedangkan aturan adalah seperangkat hukum, teratur, sesuatu yang mengikat. Menurut Warren (2015) akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi menurut Wilopo (2006) dalam Ade (2017) adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24/2005 menyebutkan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya. Aturan akuntansi khususnya di Pemerintahan diatur di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dinyatakan menaati aturan akuntansi jika organisasi telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK No. 1, IAI, 2017).

### **Motivasi**

Menurut Lubis (2017) motivasi berasal dari bahasa latin “*movere*” yang artinya menimbulkan pergerakan. Motivasi diartikan sebagai proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif.

Menurut Alma (2011) motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan yang sangat besarlah yang akan menentukan perilaku seseorang. Menurut Kartono (2002) dalam Ade (2017) motivasi berasal dari kata Latin “*motivius*” artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia.

Motivasi untuk berbuat kecurangan berhubungan dengan motivasi negatif. Motivasi negatif adalah perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan. faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yaitu *need* (kebutuhan). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

## Pengembangan Hipotesis

### **Hubungan Moralitas Individu dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)**

Moralitas individu merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan menunjukkan bahwa moralitas individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang yang memiliki moralitas individu yang rendah berperilaku akan berbeda dengan orang yang memiliki moralitas individu yang tinggi. Artinya semakin tinggi tahapan moralitas individu semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan organisasi semata, terlebih kepentingan pribadi. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Ha<sub>1</sub> : Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*Fraud*).

### **Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)**

Wilopo (2006) dalam Sukardi (2015) , sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi organisasi terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Semakin baik pengendalian internal organisasi maka akan rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan dan semakin tinggi kepatuhan pengendalian intern maka akan rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan (Permatasari, 2017). Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Ha<sub>2</sub> : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

### **Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kecenderungan kecurangan akuntansi (*Fraud*)**

Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset intansi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya. Ketaatan aturan akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, Wild (2005) dalam Ade (2017). Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan taat terhadap aturan akuntansi dapat memperkecil perilaku curang. Suatu instansi pemerintahan akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Ha<sub>3</sub> : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*Fraud*).

### **Hubungan Motivasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)**

Motivasi untuk berbuat kecurangan berhubungan dengan motivasi negatif. Faktor yang memotivasi seseorang melakukan kecurangan salah satunya adalah kebutuhan, jadi untuk memenuhi kebutuhan seseorang bisa melakukan apa saja demi tercukupinya kebutuhan. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

Ha<sub>4</sub> : Motivasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*)

## 3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada dinas kabupaten Tanggamus yang berjumlah 1.504 tenaga kerja. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sampel yang memenuhi syarat dalam penelitian ini yaitu 106 tenaga kerja dari 20 dinas pada subbagian keuangan yang terdiri dari kasubag, bendahara dan staf keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Tanggamus.

## Definisi Operasional Variabel

### **Moralitas Individu**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur moralitas individu terdiri dari 4 (Empat) pernyataan yang dikembangkan oleh Nugroho (2017), dengan indikator *Multidimensional Ethic Scale* (MES) yang

terdiri dari konstruk moral terefleksi yaitu *justice* atau *moral equity*, *egoism*, *utilitarianism* dan *deontology/contractual*. Trisnawati, dkk (2017).

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari 5 (lima) pernyataan yang dikembangkan dari PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dalam Shidqi (2017). Variabel ini diukur dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur ketaatan aturan akuntansi terdiri dari 6 (enam) pernyataan yang dikembangkan Shintadevi, P. F. (2015), dengan indikator pengungkapan, penyajian informasi yang bermanfaat untuk publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian.

### **Motivasi**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur motivasi terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang dikembangkan oleh Kurniawan (2013) dan Zahara (2017), dengan indikator kemauan, tanggung jawab, tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kebutuhan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **Outer Model**

#### **A. Uji Validitas**

Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Berdasarkan data yang diolah SmartPLS 3.0 dinyatakan memiliki validitas yang baik karena nilai *loading factor* diatas 0.70.

##### **1. AVE**

Hasil dalam validitas *convergent* dihitung dengan melihat *output construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat nilai AVE. Berdasarkan pengujian masing-masing variabel memiliki nilai diatas 0,5. Hal ini dapat diartikan bahwa kontrak memiliki nilai *convergent* yang baik.

##### **2. Validitas Diskriminan**

Kriteria *cross loading* dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik apabila korelasi antara kontrak dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari kontrak blok lainnya. Berdasarkan pengujian menggunakan SmartPLS 3.0 korelasi antara kontrak dengan indikator variabel satu lebih tinggi dari pada korelasi dengan indikator dari kontrak variabel lain, begitu seterusnya, hal ini menunjukkan bahwa data memiliki validitas diskriminan yang baik.

##### **3. Perbandingan Nilai Kuadrat Korelasi**

Untuk melihat *discriminant validity* yang baik adalah dengan melakukan perbandingan. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Berdasarkan tabel nilai AVE tidak melebihi nilai akar AVE, hal ini menunjukkan bahwa data memiliki validitas diskriminan yang baik.

#### **B. Uji Reliabilitas**

Pemeriksaan reliabilitas kontrak dengan melihat *output construct reliability and validity* yang didalamnya terdapat hasil *output composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Dikatakan reliabel jika nilai lebih dari 0.70. Berdasarkan tabel data dinyatakan reliabel karena nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0.70.

### Inner Model

#### A. Coefficient Determination ( $R^2$ )

Konstrak endogen diuji untuk menguatkan antara konstrak eksogen dengan mengevaluasi  $R^2$ . Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  konstrak kecenderungan kecurangan akuntansi adalah 0.147. Artinya konstrak moralitas individu, sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan akuntansi, motivasi dan penegakan hukum mampu berkontribusi dan menjelaskan variabel konstrak kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 14.7%, sisanya 85.3% diterangkan oleh konstrak lainnya diluar yang diteliti.

#### B. Path Coefficient

Pengujian *path coefficient* digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstrak adalah kuat. Pada *original sample* hubungan antar konstrak dikatakan kuat jika *path coefficient* tersebut lebih besar dari 0.100, selanjutnya dikatakan signifikan jika *path coefficient* 0.050 pada T statistik. Moralitas individu menunjukkan nilai original sampel 0.105, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dengan nilai -0.143 dan motivasi dengan nilai -0.321, dan sistem pengendalian internal pemerintah *original sample* -0.044 atau kurang dari 0.100.

### Pengujian Hipotesis

Diperoleh bahwa variabel moralitas individu, sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan akuntansi memiliki arah *negatif* sedangkan motivasi memiliki arah yang positif. Hal ini berarti bahwa semakin moralitas individu, sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan tinggi akan mengurangi tingkat kecurangan sedangkan semakin tinggi motivasi seseorang melakukan kecurangan semakin bertambah tingkat kecurangan tersebut.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji terhadap koefisien parameter antara moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) menunjukkan nilai *path coefficient* -0.320 dengan nilai t statistik sebesar 2.911 dapat dikatakan  $H_{a1}$  berpengaruh negatif berada pada signifikan 0.01 yang berarti moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). pengaruh negatif menunjukkan semakin tinggi moralitas individu yang dimiliki maka akan semakin kecil intensi melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) menunjukkan nilai *path coefficient* -0.044 dengan nilai t statistik 0.400. Dapat dikatakan  $H_{a2}$  tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), karena nilai t statistik juga tidak menunjukkan pada kriteria nilai signifikansi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil penelitian sama dengan Rahmi, F., & Sovia, A. (2017)., Pristiyanti, I. R. (2012) dan Najah, A. F. (2013). pengaruh negatif keefektifan pengendalian internal, dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Berbeda dengan Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017) pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat terjadinya kecurangan akuntansi artinya semakin efektif pengendalian internal suatu instansi maka, kecurangan akuntansi yang terjadi akan berkurang

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) menunjukkan nilai *path coefficient* -0.143 dengan nilai t statistik 1.085. Dapat dikatakan  $H_{a3}$  diterima atau berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Pengaruh negatif menunjukkan jika suatu instansi taat terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat berkurang. Jadi suatu instansi pemerintahan akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Sariningsih, E. (2013).

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara motivasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) menunjukkan nilai *path coefficient* 0.104 dengan t statistik 0.624. Dapat dikatakan  $H_{a4}$  diterima atau berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Jadi, motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* adalah tekanan dan kebutuhan atau motivasi

negatif, pengaruh positif menunjukkan semakin tinggi motivasi negatif dari aparat pemerintah maka kecenderungan kecurangan akuntansi juga akan semakin bertambah.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*), ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dan motivasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dalam penelitian mengenai tindakan *fraud* seperti integritas, tekanan, dan asimetri informasi.

## Daftar Pustaka

- Ade, A. (2017). Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Adinda, Y. M. (2015). *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG).
- Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan*. Edisi revisi. Bandung: Alfabeta.
- Agoes, Sukrisno. 2016. *Auditing*. Edisi Keempat-Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardianingsih, Arum. 2018. *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam & Hengky Latan. 2015. *Partial Least Squares (PLS) Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Undip.
- Kurniawan, A. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Pada KSP Kopda Belitang). Skripsi FISIP Universitas Lampung
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2017. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Manan, A., Rahmawati, W., & Alfianto, N. (2018). Pemahaman Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kompensasi Dan Kendali Religius Terhadap Pengungkapan Fraud Akuntansi Oleh Akuntan Publik. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(2), 178-190.
- Najah, A. F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: persepsi pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Novikasari, Y., Desmiyawati, D., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Skpd Kab. Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1516-1530.
- Nugroho, Fajar Qoirul. 2017. Pengaruh Moralitas Individu dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Mengenai Praktik Akuntansi Kreatif di Perusahaan dengan Tingkat Pemahaman Kode Etik Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(1), 37-44.
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Purwanto, Bambang Tri dan Sunardi. 2012. *Khazanah Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Rahmi, F., & Sovia, A. (2017). Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Developer Di Pekanbaru. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 13(1), 48-66

- Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 10-20..
- Sagala, Syaiful. 2013. *Etika dan Moralitas Pendidikan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sariningsih, E. (2013). Pengaruh Akuntabilitas, Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati*, 2(2).
- Savitri, E., Agusti, R., & Frilia, F. (2015). Pengaruh Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1)
- Shidqi, A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Fraud Di Instansi Pemerintahan* (Doctoral dissertation). Universitas Hasanudin, Makasar
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soeratno & Lincoln, Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, E., Sembel, R., Gunawan, J., & Waluyo, W. (2017). Pengaruh Kualitas Manajer Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Etika Machiavellian Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi*, 22(3)
- Urbach, Nilss & Frederik Achleman. 2010. *Structural Equating Modelling in Information Systems Research Using Partial Least Squares. Journal of Information Technology Theory and Application. European Business School*.
- Warren, Carl S. et al. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 25. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Supardi. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Yamin, Sofyan. Heri Kurniawan. 2011. *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian, dengan Partial Least Sq Path Modeling: Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS dan Visual PLS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusriwati, Y. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Zahara, A. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud)(Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 5(2)..
- Zimbelman, Mark. F. et al. 2014. *Akuntansi Forensik (Forensik Accounting)*. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- <http://www.detik.com> diakses tanggal 20 September 2018
- Diakses di [www.tempo.com](http://www.tempo.com) pada 01 Oktober 2018. *Indonesian Corruption Watch (ICW)*.
- <https://www.kamusbesarbahasaonline.com>
- Diakses Tanggal 20 September 2018 <https://www.kpk.go.id>
- <https://www.kompas.com> diakses tanggal 15 oktober 2018
- <https://www.saibumi.com> diakses tanggal 01 oktober 2018
- <https://www.tempo.com> diakses tanggal 01 oktober 2018